

2023

RENJA PERUBAHAN 2023



**DINAS
KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
PROVINSI
BANTEN**

Kawasan Pusat Pemerintahan
Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syeh Nawawi Albantani - Serang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karubianya, sehingga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Tahun 2023 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Banten. Dengan demikian rencana kerja perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dan RPD dan Renstra 2023-2026. Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sampai dengan bulan Juni 2023 atau di TW II, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2023.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2023 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan

datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten.

Serang, Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian Provinsi Banten



Nana Suryana, ST, M.Si

NIP. 197106241998031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan	1
1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan	2
1.3 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	6
A. Evaluasi Kinerja Sasaran	6
B. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan	10
BAB III RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	26
BAB IV PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2023 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada. Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Banten tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2023-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk :

- a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional

- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
- e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional
- f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan.
- g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.
- h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 DASAR PERTIMBANGAAN PERUBAHANAN

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Nomor : 050 / 2517 -BAPP / 2023 tanggal 26 Juli 2023 Pagu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang

berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran. Salah satu misi pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang tercantum dalam RKPD yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas. Sasaran dari misi tersebut adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

Prioritas pembangunan Provinsi Banten pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 diantaranya adalah Reformasi Birokrasi, sesuai dengan prioritas pembangunan Propinsi Banten menjadi prioritas yang ke 3 yaitu Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi. Prioritas Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi diarahkan pada Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasis e-government dalam mendukung pembangunan. Keterkaitan Renja OPD dengan Renstra OPD, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD OPD) setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023 akan

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi

Banten Tahun 2023 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS). Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Berita Dearh Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUAN RENJA

BAB I PENDAHULUAN, memuat :

1.1 Maksud dan Tujuan

1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan

1.3 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada tabel 2.4.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

A. EVALUASI KINERJA SASARAN

Pencapaian Kinerja sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2023, adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, yang diukur dengan Indikator Sasaran “Nilai Capaian SAKIP Perangkat Daerah”. Pada tahun 2022 target nilai SAKIP adalah 85, dengan hasil Penilaian dari Inspektorat adalah 81.20 dengan kategori **Memuaskan**. dengan demikian target nilai Capaian SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, statistic dan Persandian Provinsi Banten tidak tercapai di tahun 2022, sedangkan penilaian di tahun 2023 masih dilakukan sehingga masih menggunakan penilaian tahun 2022.
2. Meningkatnya layanan informasi public yang transparan dan patisipatif, yang diukur dengan Indikator Kinerja “Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik” pada tahun 2022 target Indeks keterbukaan Informasi Publik adalah 90, dengan hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat pada Badan Publik adalah 97.91 dengan kategori **Informatif**. dengan demikian target nilia Indeks Keterbukaan Informasi pada tahun 2022 tercapai. Penilaian di tahun 2023 masih berjalan, sehingga nilai yang digunakan penilaian tahun 2022.
3. Meningkatnya penerapan SPBE, yang diukur dengan Indikator Kinerja “Nilai Indeks Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada tahun 2022 target Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah 4, dengan hasil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah 3.05 dengan Predikat **Baik**. dengan demikian target Nilai Indeks Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada

tahun 2022 tidak tercapai. Penilaian di tahun 2023 masih berjalan, sehingga nilai yang digunakan penilaian tahun 2022.

4. Meningkatnya kualitas ketersediaan data statistic sectoral, yang diukur dengan Indikator Kinerja “Persentase maturitas data base statistic sectoral” pada tahun 2022 target target sebesar 100%, dengan nilai di tahun 2022 persentase ketercapaian maturitas database statistic sectoral sebesar 100%.
5. Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi, yang diukur dengan Indikator Kinerja “Score Indeks keamanan informasi (KAMI)”. Indicator kinerja ini merupakan indicator baru di tahun 2023 dengan target score sebesar 273. Adapun score di tahun 2022 hasil penilain BSSN adalah sebesar 257 Score

Adapun dalam bentuk table kami sajikan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2022 :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2022

Sasaran	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Keterangan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	85	81.20	
Meningkatnya layanan informasi public yang transparan dan partisipatif	90	97.91	
Meningkatnya penerapan SPBE	4	3.05	
Meningkatnya kualitas ketersediaan data statistic sectoral	100	100	
Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi	-	257	Tahun 2023 Indikator Kinerja pada sasaran ini berubah menjadi Score Indeks keamanan informasi (KAMI)

Terhadap sasaran program Dinas Komunikasi, Informatika, statistic dan Persandian Provinsi Banten pada tahun 2023 memiliki 5 Program, yaitu 4 Program yang mengampu kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dan 1 Program penunjang. Adapun program dan sasaran yang dimaksud adalah :

Table 2.2 Program, sasaran, Indikator, Target , Realisasi 2022 dan Target 2023

Program	Sasaran	Indikator Sasaran Program	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Ket
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100	100	100	Pada Tahun 2023 indikator sasaran berubah menjadi “Persentase Ketercapaian dari seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi” Tahun 2022 Program ini memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja sasaran dan pada tahun 2023 berubah menjadi 1 (satu) Indikator kinerja sasaran
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	100		
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	100		
		Persentase Sarana	100	100		

		Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah				
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100	100		
	Meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	-	-	100	Merupakan sasaran Program dan Indikator Kinerja baru di tahun 2023, sehingga di tahun 2022 tidak terdapat target dan realisasi
		Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF	-	-	39.39	Merupakan sasaran Program dan Indikator Kinerja baru di tahun 2023, sehingga di tahun 2022 tidak terdapat target dan realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK)				
		Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)				
	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi,	-	-	90.91	Merupakan sasaran Program dan Indikator Kinerja baru di tahun 2023, sehingga di tahun 2022 tidak terdapat target dan realisasi

		Informatika, Statistik dan Persandian				
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	-	-	100	Merupakan sasaran Program dan Indikator Kinerja baru di tahun 2023, sehingga di tahun 2022 tidak terdapat target dan realisasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Ketersediaan Data Sektoral	Ketersediaan Database Statistik Sektoral				
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	-	-	100	Merupakan Indikator Kinerja baru di tahun 2023, sehingga di tahun 2022 tidak terdapat target dan realisasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan informasi	Cakupan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi				
	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	-	-	273	Merupakan Indikator Program baru di tahun 2023, sehingga di tahun 2022 tidak terdapat target, namun untuk realisasi pada tahun 2022 sebesar 257

B. EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan TW II (sd Juni 2023) sebagai berikut :

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun evaluasi sampai dengan TW II Tahun 2023 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.803.650.511	8.659.821.152	36.38	56.78	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000	157.877.900	31.58	61.07	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	293.508.000	103.766.200	35.35		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.800.000	0	0		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen OPerubahan RKA-SKPD	15.800.000	0	0		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.800.000	0	0		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.800.000	0	0		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	104.153.000	46.9778.900	45.11		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.139.000	7.132.800	14.52		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.226.804.642	5.297.132.871	37.23	57.31	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.796.314.6442	5.174.705.671	3.75		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	362.490.000	98.942.500	27.30		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.686.100	18.369.300	43.03		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.106.100	1.923.400	27.07		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.735.100	0	0		
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.771.200	0	0		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.370.500	3.192.000	38.13		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.341.000	0	0		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.000.000	0	0	61.10	

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	0	0		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	0	0		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	0	0		
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	357.434.400	191.795.600	53.66	64.70	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	136.434.400	135.618.700	99.40		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.000.000	1.440.000	24.00		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000	680.000	13.60		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000	9.056.900	30.19		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.000.000	45.000.000	25.00		
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	763.4277.680	410.499.800	5.38	73.01	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.2774.400	40.271.000	9.76		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.861.600	177.820.500	89.42		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	58.315.000	97.19		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	220.000.000	90.666.300	41.21		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.000.000	39.095.000	53.55		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.291.680	4.332.000	2.96		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.000.000	0	0		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.000.000	0	0		
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.989.540.369	795.679.000	26.62	31.73	
	Pengadaan Mebel	234.311.600	0	0		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.144.182.069	0	0		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.611.046.700	795.679.000	49.39		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.902.324.520	1.673.320.781	42.88	53.85	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.086.264.000	294.438.895	27.11		

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.816.060.520	1.378.881.886	48.96		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.048.118.900	133.515.200	12.74	51.30	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.000.000	8.184.000	19.96		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	486.820.000	102.946.200	21.15		
	Pemeliharaan Mebel	6.458.900	0	0		
8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	183.040.000	14.810.000	8.09		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.800.000	7.575.000	9.38		
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	12.686.573.000	5.589.767.200	44.06	63.67	
9	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	12.686.573.000	5.589.767.200	44.06	63.67	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	384.325.000	74.696.000	19.44		
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	661.600.000	270.011.500	40.81		
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.409.154.000	163.455.600	4.79		
	Pelayanan Informasi Publik	442.154.000	122.900.750	27.80		
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3.830.010.000	3.465.033.250	90.47		
	Manajemen Komunikasi Krisis	154.950.000	37.037.100	23.90		
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	82.150.000	28.977.000	35.27		
	Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	3.647.000.000	1.404.973.000	38.52		
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	75.230.000	22.683.000	30.15		
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	28.509.955.389		30.57	56.85	
10	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	14.917.011.639	2.386.182.704	31.13	57.34	

	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	30.000.000	1.389.650	4.63		
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.000.000	9.242.750	30.81		
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	14.857.011.639	4.632.557.764	31.18		
11	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	13.592.943.750	3.256.064.948	29.37	96.36	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	207.464.100	56.910.500	27.43		
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	30.000.000	9.626.250	32.09		
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.605.677.900	771.238.250	48.03		
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	7.013.250.000	2.344.200.118	33.43		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	30.000.000	12.4677.000	41.56		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	2.339.773.750	339.652.000	14.52		
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	920.428.000	387.462.500	42.10		
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	392.230.000	62.255.750	15.87		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	500.000.000	78.310.500	15.66		
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	104.260.000	0	0		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	449.860.000	11.571.700	2.57		
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.055.542.600	277.462.200	26.29	55.60	
12	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	1.005.542.600	277.462.200	26.29	55.60	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	767.016.500	250.405.200	32.65		

	Sektoral					
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	50.010.000	14.640.000	29.27		
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	25.574.000	0	0		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	89.998.000	1.790.000	1.99		
	Pengembangan Infrastruktur	63.056.100	0	0		
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	59.888.000	10.627.000	17.74		
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.750.278.500	255.212.919	9.28	52.48	
13	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2.750.278.500	255.212.919	9.28	52.48	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	99.820.000	1.276.000	1.28		
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.609.682.500	240.555.919	9.22		
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	40.776.000	13.381.000	32.82		

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW II Tahun 2022) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, diusulkan berkurang karena optimalisasi anggaran;
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, diusulkan bertambah karena ada penambahan TP ASN;
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;

4. Pengelolaan dan penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
5. Pengamanan barang Milik Daerah SKPD, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
6. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
7. Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
8. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
9. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
10. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
12. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
13. Pelayanan Informasi Publik, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
14. Manajemen Komunikasi Krisis, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
15. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
16. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
17. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government Pemerintahan Daerah Provinsi, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
18. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
19. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;

20. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
21. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
22. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
23. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
24. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
25. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
26. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah dalam Peningkatan Mutu Statistik daerah yang Terintegrasi, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
27. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
28. Pengembangan Infrastruktur, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
29. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintaah Daerah Provinsi, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
30. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;
31. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah daerah Provinsi, diusulkan berkurang karena adanya optimalisasi anggaran;

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2023**

Indikator dan Target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang mengacu pada Sasran Perangkat Daerah			
1	Capaian SAKIP (system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70 - 80
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	91.8
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3.25
4	Persentase ketersediaan data base statistik sektoral	Persen	100
5	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	273

Tabel 2.4 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Tahun 2023

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Pada Akhir Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Ket
						Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023 (%)		
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	6	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE KETERCAPAIAN DARI SELURUH KEGIATAN PADA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	100 %	100 %	23.803.650.511	63.43	13.009.964.940	56.78	8.659.821.152	89.51	60.45	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500.000.000	68.26	341.284.900	61.07	157.877.900	89.47	46.26	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	293.508.000		272.605.200		103.766.200		38.06	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 Dokumen	15.800.000		0		0		0	

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 Dokumen	15.800.000		0		0		0
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2 Dokumen	10.800.000		0		0		0
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			2 Dokumen	10.800.000		0		0		0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	104.153.000		61.546.900		46.9778.900		76.33
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	49.139.000		7.132.800		7.132.800		100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		14.226.804.642	58.51	7.741.326.300	57.31	5.297.132.871	97.95	68.43
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			57 Orang	13.796.314.6442		7.527.837.800		5.174.705.671		68.74
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	362.490.000		181.245.000		98.942.500		54.59
		elaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	42.66.100		22.297.100		18.369.300		82.38
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Dokumen	7.106.100		3.499.500		1.923.400		54.96
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Dokumen	3.735.100		0		0		0
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1 Dokumen	3.771.200		0		0		0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			18 Laporan	8.370.500		4.104.900		3.192.000		77.76

		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokuem	2.341.000		2.341.000		0		0
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %		16.000.000	63.96	10.233.200	61.10	0	95.53	0
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	5.000.000		4.788.200		0		0
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	5.000.000		0		0		0
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			3 Dokumen	6.000.000		5.445.000		0		0
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %		357.434.400	95.68	341.991.500	64.70	191.795.600	67.62	56.08
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			3 Paket	136.434.400		136.464.400		135.618.700		99.40
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	6.000.000		6.000.000		1.440.000		24
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			1 Dokumen	5.000.000		5.000.000		680.000		16.60
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			14 Dokumen	30.000.000		14.557.100		9.056.900		62.22
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			24 Orang	180.000.000		180.000.000		45.000.000		25
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		763.4277.680	76.47	583.787.400	73.01	410.499.800	95.48	70.32
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	41.2774.400		41.274.400		40.271.000		97.57
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	198.861.600		198.861.600		177.820.500		89.42
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 paket	60.000.000		60.000.000		58.315.000		97.19
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	220.000.000		110.763.400		90.666.300		81.86

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	73.000.000		73.000.000		39.095.000		53.55
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	146.291.680		75.888.000		4.332.000		5.71
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	12.000.000		12.000.000		0		0
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			3 Dokumen	12.000.000		12.000.000		0		0
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		2.989.540.369	33.32	1.394790.300	31.73	795.679.000	95.23	0
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 paket	234.311.600		358.700		0		0
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			77 Unit	1.144.182.069		394.082.400		0		0
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			19 Unit	1.611.046.700		1.000349.200		795.679.000		79.54
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		3.902.324.520	56.33	2.042.034.200	53.85	1.673.320.781	95.60	81.94
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	1.086.264.000		543.836.304		294.438.895		54.14
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	2.816.060.520		1.498.197.902		1.378.881.886		92.04
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		1.048.118.900	54.92	554.517.134	51.30	133.515.200	93.41	24.08
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1 Unit	41.000.000		20.500.000		8.184.000		38.92
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak			21 Unit	486.820.000		269.597.800		102.946.200		38.19

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya										
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			17 Unit	6.458.900		3.746.800		0		0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			266 Unit	183.040.000		95.336.334		14.810.000		15.53
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	250.000.000		124.937.000		0		0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			1 Unit	80.800.000		40.400.000		7.575.000		18.75
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP AKSES DAN KUALITAS KONTEN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	100 %	100 %		12.686.573.000	64.54	7.806.704.650	63.67	5.589.767.200	98.65	71.60
		PERSENTASE OPD YG MENCAPAI KATEGORI INFORMATIF	39.39	39.39								
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				12.686.573.000	64.54	7.806.704.650	63.67	5.589.767.200	98.65	71.60
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			12 Dokumen	384.325.000		105.170.000		74.696.000		71.02
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			12 Dokumen	661.600.000		330.571.000		270.011.500		81.68
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			12 Dokumen	3.409.154.000		1.706.263.400		163.455.600		9.58
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			12 Dokumen	442.154.000		211.020.700		122.900.750		58.24
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			6 Dokumen	3.830.010.000		3.648.572.300		3.465.033.250		94.97
	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis			3 Dokumen	154.950.000		76.038.700		37.037.100		48.71
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya			212 Orang	82.150.000		43.101.200		28.977.000		67.23
	Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			12 Dokumen	3.647.000.000		1.660.269.900		1.404.973.000		84.62
	Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Kemitraan			3 Dokumen	75.230.000		25.697.2000		22.683.000		88.27

		Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan										
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	90.91	90.91		28.509.955.389	77.93	20.973.953.074	56.85		72.95	26.90
			PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100 %	100 %								
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				14.917.011.639	75.93	11.738.241.574	57.34	2.386.182.704	75.52	20.33
		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi			4 Domian	30.000.000		14.926.600		1.389.650		9.31
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			2 Dokumen	30.000.000		27.794.400		9.242.750		33.25
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			33 OPD / Unit	14.857.011.639		11.695.520.574		4.632.557.764		39.61
		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %		13.592.943.750	79.92	9.234.711.500	96.36	3.256.064.948	70.32	35.26
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			2 Dokumen	207.464.100		183.752.600		56.910.500		30.97
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			1 Dokumen	30.000.000		18.718.800		9.626.250		54.43
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola			2 Unit	1.605.677.900		1.158.259.500		771.238.250		66.59

		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			1 Dokumen	7.013.250.000		4.613.250.000		2.344.200.118		50.81	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			1 Dokumen	30.000.000		30.000.000		12.4677.000		41.56	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			33 PD	2.339.773.750		1.874.382.650		339.652.000		18.12	
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			8 Unit	920.428.000		498.882.150		387.462.500		777.67	
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City			3 Dokumen	392.230.000		305.748.000		62.255.750		20.36	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			16 Dokumen	500.000.000		171.494.400		78.310.500		45.66	
		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)			1 Dokumen	104.260.000		104.260.000		0		0	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE			1 Dokumen	449.860.000		275.963.400		11.571.700		44.19	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK SEKTORAL DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	100 %	100 %		1.055.542.600	56.71	566.876.300	55.60	277.462.200	98.04	48.95	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi				1.005.542.600	56.71	566.876.300	55.60	277.462.200	98.04	48.95	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			12 Dokumen	767.016.500		457.071.700		250.405.200		54.78	
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang			50 Orang	50.010.000		48.510.000		14.640.000		30.18	

	Daerah yang Terintegrasi	Terintegrasi											
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun			1 Dokumen	25.574.000		0		0		0	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral			41 Orang	89.998.000		40.238.600		1.790.000		4.45	
	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik			11 Unit	63.056.100		0		0		0	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun			1 Dokumen	59.888.000		21.056.000		10.627.000		50.47	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH	54.6	54.6		2.750.278.500	54.05	1.379.82.00	52.48	255.212.919	97.10	18.50	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				2.750.278.500	54..05	1.379.782.000	52.48	255.212.919	97.10	18.50	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan			6 Dokumen	99.820.000		32.160.000		1.276.000		3.97	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			4 Laporan	2.609.682.500		1.327.354.000		240.555.919		18.12	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			39 PD	40.776.000		20.268.000		13.381.000		66.02	
	Rata-rata Capaian kinerja										91.25 %	49.43%	
	Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	Total Anggaran dari Seluruh Program					68.806.000.000		43.736.280.964		23.499.148.903			
											34.45%	53.73%	
											Sangat Rendah	Rendah	
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		:										
	Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		:	1. Realisasi keuangan masih dalam proses pertanggungjawaban									
				2. Belanja Lisensi (Zoom dan ArcGIS) tidak diresap karena adanya kenaikan harga									

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2023

Menindaklanjuti Surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah Nomor : 050 / 2642 – BAPP / 2023 Tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023, maka Dinas Komunikasi, Informatia, Statistik dan Persandian Provinsi Banten wajib menyusun Perubahan Renja Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja RKPD tahun 2023. Adapun rencana kerja perubahan tahun 2023 sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran		selisih
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE KETERCAPAIAN DARI SELURUH KEGIATAN PADA PROGRAM PENUNJANG URUSAN	100	100	23.803.650.511	24.396.566.699	592.916.188
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan,	100	100	500.000.000	445.136.000	54.864.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	293.508.000	238.644.000	54.864.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.800.000	15.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.800.000	15.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.800.000	10.800.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.800.000	10.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	104.153.000	104.153.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	49.139.000	49.139.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	14.226.804.642	15.056.890.830	830.086.188
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang	50 Orang	13.796.314.642	14.687.832.830	891.518.188
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	362.490.000	294.870.000	67.620.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	42.686.100	42.686.100	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	7.106.100	7.106.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.7250.100	3.725.100	

	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.771.200	9.959.200	6.188.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	8.370.500	8.370.500	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.341.000	2.341.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	16.000.000	12.954.000	3.046.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	3.154.000	1.846.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	6.000.000	4.800.000	1.200.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	357.434.400	244.174.400	113.260.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	136.434.400	136.434.400	

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	1.440.000	4.560.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	800.000	4.200.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14 Dokumen	14 Dokumen	30.000.000	15.500.000	14.500.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Dokumen	24 Dokumen	180.000.000	90.000.000	90.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	763.427.680	763.427.680	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	41.274.400	41.274.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	198.961.600	198.861.600	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60.000.000	60.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket	12 Paket	220.000.000	220.000.000	
	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	73.000.000	73.000.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	146.291.680	146.291.680	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	12.000.000	12.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	2.989.540.369	2.989.540.369	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	234.311.600	231.311.600	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77 Unit	77 Unit	1.144.182.069	1.144.182.069	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	1.611.046.700	1.611.046.700	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	3.902.324.520	3.836.324.520	66.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.086.264.000	1.020.264.000	66.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.816.060.520	2.816.060.520	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	1.048.118.900	1.048.118.900	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	41.000.000	41.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit	486.820.000	486.820.000	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	6.458.900	6.458.900	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	266 Unit	266 Unit	183.040.000	183.040.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	250.000.000	250.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	80.800.000	80.800.000	

	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP AKSES DAN KUALITAS KONTEN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	100	100	12.686.573.000	12.602.941.900	86.631.100
		PERSENTASE OPD YG MENCAPAI KATAGORI INFORMATIF	39.39	39.39			
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	100	100	12.686.573.000	12.602.941.900	83.631.100
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	384.325.000	373.914.600	10.410.400
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	661.600.000	661.600.000	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	3.409.154.000	3.409.154.000	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	442.154.000	399.602.000	42.552.000
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	6 Dokumen	6 Dokumen	3.830.010.000	3.830.010.000	
	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	3 Dokumen	3 Dokumen	154.950.000	150.500.000	4.450.000
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	212 Orang	212 Orang	82.150.000	70.880.000	11.270.000

	Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	3.647.000.000	3.639.551.300	7.448.700
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 Dokumen	3 Dokumen	75.230.000	67.730.000	7.500.000
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	90.91	90.91	28.509.955.389	27.345.698.289	1.1644.257.100
		PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100	100			
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100	100	14.917.011.639	14.118.688.039	798.323.600
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000	30.000.000	

	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	30.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	33 OPD / Unit	33 OPD / Unit	14.857.011.639	14.058.688.039	798.323.600
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100	100	13.592.943.750	13.227.010.250	365.933.500
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	207.464.100	188.086.700	19.377.400
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	20.250.000	9.750.000
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	2 Unit	1.605.677.900	1.605.677.900	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	7.013.250.000	7.007.650.000	5.600.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	15.814.000	14.186.000

	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	33 PD	33 PD	2.339.773.750	2.333.353.750	6.420.000
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	8 Unit	8 Unit	920.428.000	881.578.000	38.850.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	3 Dokumen	3 Dokumen	392.230.000	327.147.900	65.082.100
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen	500.000.000	326.932.000	173.068.3000
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	1 Dokumen	104.260.000	104.260.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	449.860.000	416.260.000	33.600.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK SEKTORAL DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	100	100	1.055.542.600	890.795.800	164.746.800

	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	100	100	1.055.542.600	890.795.800	164.746.800
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	12 Dokumen	767.016.500	680.207.500	86.809.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	50 Orang	50 Orang	50.010.000	29.320.000	20.690.000
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	25.574.000	25.574.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral	41 Orang	100 Orang	89.998.000	55.092.200	34.905.800
	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	11 Unit	3 Unit	63.056.100	57.056.100	6.000.000
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	59.88.000	43.546.000	16.342.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH	54.6	54.6	2.750.278.500	2.582.988.500	167.290.000

	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100	100	2.750.278.500	2.582.988.500	167.290.000
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	6 Dokumen	6 Dokumen	99.820.000	85.660.000	14.160.000
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	umlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	4 Laporan	2.609.682.500	2.461.362.500	148.320.000
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	39 PD	39 PD	40.776.000	35.966.000	4.810.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 sampai bulan Juni 2023 Triwulan II (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2023 dan bersifat indikatif. Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang di Pemerintah Provinsi Banten, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2023 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada pengurangan pagu indikatif sebesar Rp. 987.008.812,- atau 5,11 % dari anggaran semula murni Rp.68.806.000.000,- menjadi anggaran perubahan Rp.67.818.991.188,- perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023